**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017**

Jl. SALAK III NO. 38

Madiun - Jawa Timur 63131

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186

e-mail : dil\_mil\_madiun@yahoo.co.id

**Jl. SALAK III NO. 38**

**Madiun - Jawa Timur**

****

**LAPORAN KEUANGAN**

**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. SALAK III NO. 38**

**Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186**

**Madiun - Jawa Timur 63131**

**e-mail : dil\_mil\_madiun@yahoo.co.id**

*KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Madiun, 13 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P

*DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

[Kata Pengantar i](#_Toc503881670)

[Daftar Isi ii](#_Toc503881671)

[Pernyataan Tanggung Jawab iii](#_Toc503881672)

[Ringkasan 10](#_Toc503881673)

[I. Laporan Realisasi Anggaran 14](#_Toc503881674)

[II. Neraca 16](#_Toc503881675)

[III. Laporan Operasional 19](#_Toc503881676)

[IV. Laporan Perubahan Ekuitas 22](#_Toc503881677)

[V. Catatan atas Laporan Keuangan 24](#_Toc503881678)

[A. Penjelasan Umum 24](#_Toc503881679)

[A.1. Dasar Hukum 24](#_Toc503881680)

[A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun 25](#_Toc503881681)

[A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 26](#_Toc503881682)

[A.4. Basis Akuntansi 27](#_Toc503881683)

[A.5. Dasar Pengukuran 27](#_Toc503881684)

[A.6. Kebijakan Akuntansi 27](#_Toc503881685)

[B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 35](#_Toc503881686)

[B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 35](#_Toc503881687)

[B.2. Belanja 35](#_Toc503881688)

[C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 39](#_Toc503881689)

[C.1. Aset Lancar 39](#_Toc503881690)

[C.2. Aset Tetap 40](#_Toc503881691)

[C.3. Aset Lainnya 47](#_Toc503881692)

[C.5. Kewajiban Jangka Pendek 48](#_Toc503881693)

[C.6. Ekuitas 49](#_Toc503881694)

[D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 49](#_Toc503881695)

[D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 49](#_Toc503881696)

[D.2. Beban Pegawai 49](#_Toc503881697)

[D.3. Beban Persediaan 50](#_Toc503881698)

[D.4. Beban Barang dan Jasa 51](#_Toc503881699)

[D.5. Beban Pemeliharaan 51](#_Toc503881700)

[D.6. Beban Perjalanan Dinas 52](#_Toc503881701)

[D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 52](#_Toc503881702)

[D.8. Beban Bantuan Sosial 53](#_Toc503881703)

[D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 54](#_Toc503881704)

[D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 54](#_Toc503881705)

[D.11. Beban Lain-lain 55](#_Toc503881706)

[D.12. Kegiatan Non Operasional 55](#_Toc503881707)

[D.13. Pos Luar Biasa 56](#_Toc503881708)

[E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 57](#_Toc503881709)

[E.1. Ekuitas Awal 57](#_Toc503881710)

[E.2. Surplus (defisit) LO 57](#_Toc503881711)

[E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset 57](#_Toc503881712)

[E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan 57](#_Toc503881713)

[E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap 58](#_Toc503881714)

[E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 58](#_Toc503881715)

[E.3. 5 Koreksi Lain-lain 58](#_Toc503881716)

[E.4. Transaksi Antar Entitas 59](#_Toc503881717)

[E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 60](#_Toc503881718)

[E.4. 2Transfer Masuk/Transfer Keluar 60](#_Toc503881719)

[E.3. Ekuitas Akhir 60](#_Toc503881720)

[F. Pengungkapan Penting Lainnya 61](#_Toc503881721)

[F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 61](#_Toc503881722)

[F.2. Pengungkapan Lain-lain 61](#_Toc503881723)

[Daftar dan Lampiran 65](#_Toc503881724)

[Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 66](#_Toc503881725)

*PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

**Pengadilan Militer III - 13 Madiun**

**Jl. SALAK III NO. 38 Madiun - Jawa Timur 63131**

**Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186 e-mail : dil\_mil\_madiun@yahoo.co.id**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 13 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P

*RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 *.*

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.789.824.911 atau mencapai 96,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.882.746.000.

1. **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2016.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12.078.115.595, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 5.815.400; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 12.071.859.195; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 441.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 6.374.152 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 6.374.152 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 12.071.741.443, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 12.071.741.443.

1. **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.889.400.875 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 2.889.400.875. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 299.200 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 299.200 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 2.889.101.675)

1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 8.025.797.013 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 2.889.101.675) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 4.145.221.194 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.789.824.911 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 12.071.741.443.

1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

1. *LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

***( dalam satuan Rupiah*)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Uraian** | **Catatan** | **TA 2017** | | | **TA 2016** |
| **Anggaran** | **Realisasi** | **%** | **Realisasi** |
| A. | **Pendapatan Negara dan Hibah** | **B.1** |  |  |  |  |
| 1. | **Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **B.1.1** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
|  | **Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| B. | **Belanja Negara** | **B.2** |  |  |  |  |
| **1.** | **Belanja Pegawai** |  | **1.882.443.000** | **1.804.380.942** | **95,85** | **1.566.566.404** |
| 2. | **Belanja Barang** |  | **624.303.000** | **609.790.469** | **97,67** | **531.082.220** |
| **3.** | **Belanja Modal** |  | **376.000.000** | **375.653.500** | **99,90** | **149.000.000** |
|  | **Jumlah Belanja Negara** |  | **2.882.746.000** | **2.789.824.911** | **96,77** | **2.246.648.624** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *NERACA PERBANDINGAN*

# II. Neraca

**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | | Catatan | | 31 Desember 2017 | 31 Desember 2016 |
| ASET | |  |  |  |  |
| Aset Lancar | | **C.1** |  |  |  |
| Kas dan Bank | |  |  | 0 |  |
|  | **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **C.1.** |  | **0** | **0** |
|  | **Persediaan** | **C.1.** |  | **5.815.400** | **1.104.650** |
|  | **Jumlah Aset Lancar** |  |  | **5.815.400** | **1.104.650** |
| Aset Tetap | | **C.2** |  |  |  |
|  | **Tanah** | **C.2.** |  | **4.683.750.000** | **1.000.000.000** |
|  | **Peralatan dan Mesin** | **C.2.** |  | **2.876.749.893** | **2.534.024.493** |
|  | **Gedung dan Bangunan** | **C.2.** |  | **6.793.977.000** | **6.949.027.234** |
|  | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** | **C.2.** |  | **68.300.000** | **99.100.000** |
|  | **Aset Tetap Lainnya** | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Konstruksi dalam Pengerjaan** | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** | **C.2.** |  | **(2.350.917.698)** | **(2.549.901.391)** |
|  | **Jumlah Aset Tetap** |  |  | **12.071.859.195** | **8.032.250.336** |
| Aset Lainnya | | **C.4** |  |  |  |
|  | **Aset Lain-Lain** | **C.4.** |  | **112.631.274** | **58.385.674** |
|  | **Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya** | **C.4.** |  | **(112.190.274)** | **(58.385.674)** |
|  | **Jumlah Aset Lainnya** |  |  | **441.000** | **0** |
|  | **Jumlah Aset** |  |  | **12.078.115.595** | **8.033.354.986** |
| KEWAJIBAN | |  |  |  |  |
| Kewajiban Jangka Pendek | | **C.5** |  |  |  |
|  | **Utang kepada Pihak Ketiga** | **C.5.** |  | **6.374.152** | **7.557.973** |
|  | **Uang Muka dari KPPN** | **C.5.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** |  |  | **6.374.152** | **7.557.973** |
|  | **Jumlah Kewajiban** |  |  | **6.374.152** | **7.557.973** |
| EKUITAS | |  |  |  |  |
| Ekuitas Dana Lancar | | **C.6** |  |  |  |
|  | **Jumlah Ekuitas Dana** |  |  | **12.071.741.443** | **8.025.797.013** |
|  | **Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana** |  |  | **12.078.115.595** | **8.033.354.986** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN OPERASIONAL*

# III. Laporan Operasional

**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | | Catatan | | 31 Desember 2017 | | 31 Desember 2016 |
| Kegiatan Operasional | |  |  |  |  | |
| Pendapatan | |  |  |  | |  |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | | **D.1** |  | **0** | | **0** |
| Jumlah Pendapatan | |  |  |  | |  |
| Beban | |  |  |  | |  |
|  | **Beban Pegawai** | **D.** | **2** | **1.804.380.942** | | **1.566.566.404** |
|  | **Beban Persediaan** | **D.** | **3** | **18.424.394** | | **23.344.300** |
|  | **Beban Barang dan Jasa** | **D.** | **4** | **362.345.739** | | **329.259.660** |
|  | **Beban Pemeliharaan** | **D.** | **5** | **203.656.621** | | **161.991.249** |
|  | **Beban Perjalanan Dinas** | **D.** | **6** | **19.768.344** | | **19.665.000** |
|  | **Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat** | **D.** | **7** | **0** | | **0** |
|  | **Beban Bantuan Sosial** | **D.** | **8** | **0** | | **0** |
|  | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **D.** | **9** | **480.824.835** | | **416.935.728** |
|  | **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **D.** | **10** | **0** | | **0** |
|  | **Beban Lain-lain** | **D.** | **11** | **0** | | **0** |
|  | **Jumlah Beban** |  |  | **2.889.400.875** | | **2.517.762.341** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional** |  |  | **(2.889.400.875)** | | **(2.517.762.341)** |
| Kegiatan Non Operasional | | **D.** | **12** |  | |  |
|  | **Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **613.830** | | **856.310** |
|  | **Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **314.630** | | **126.500** |
|  | **Surplus Penjualan Aset Non Lancar** |  |  | **0** | | **0** |
|  | **Defisit Penjualan Aset Non Lancar** |  |  | **0** | | **0** |
|  | **Defisit Selisih Kurs** |  |  | **0** | | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional** |  |  | **299.200** | | **729.810** |
| Pos Luar Biasa | | **D.** | **13** |  | |  |
|  | **Pendapatan PNBP** |  |  | **0** | | **0** |
|  | **Beban Perjalanan Dinas** |  |  | **0** | | **0** |
|  | **Beban Persediaan** |  |  | **0** | | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) Laporan Operasional** |  |  | **(2.889.101.675)** | | **(2.517.032.531)** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

# IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | | Catatan | | 31 Desember 2017 | 31 Desember 2016 |
| Ekuitas Awal | | **E.** | **1** | **8.025.797.013** | **8.296.180.836** |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | | **E.** | **2** | **(2.889.101.675)** | **(2.517.032.531)** |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar | |  |  |  |  |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas | |  |  |  |  |
|  | **Penyesuaian Nilai Aset** | **E.** | **3** | **0** | **84** |
|  | **Koreksi Nilai Persediaan** | **E.** | **4** | **0** | **0** |
|  | **Selisih Revaluasi Aset Tetap** | **E.** | **5** | **4.144.682.214** | **0** |
|  | **Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi** | **E.** | **6** | **538.980** | **0** |
|  | **Koreksi Lain-lain** | **E.** | **7** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Lain-lain** |  |  | **0** | **0** |
| Transaksi Antar Entitas | | **E.** | **8** | **2.789.824.911** | **2.246.648.624** |
| Ekuitas Akhir | |  |  | **12.071.741.443** | **8.025.797.013** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

# V. Catatan atas Laporan Keuangan

## Penjelasan Umum

### Dasar Hukum

|  |
| --- |
| * 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; |
| * 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; |
| * 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan; |
| * 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar; |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar; |
| * 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;   2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015. |

### Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun

Visi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah Visi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung” Visi Dilmil III-13 Madiun bertujuan agar menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah Misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah   
1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.  
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.  
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.  
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer III - 13 Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksebilitas putusan hakim.
4. Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
6. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik.
7. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
8. Meningkatnya kualitas pengawasan.
9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.

### Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah sebagai berikut:

#### Pendapatan LRA

* + Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
  + Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  + Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Pendapatan LO

* Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
* Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  + - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
    - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
    - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
* Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
* Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Belanja

* + Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  + Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
  + Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  + Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Beban

* Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
* Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
* Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

* Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
* Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
* Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

* Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
| Lancar | **Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo** | **0.5%** |
| Kurang Lancar | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan** | **10%** |
| Diragukan | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan** | **50%** |
| Macet | 1. **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** 2. **Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN** | **100%** |

* Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
* Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

* Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
* Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
* Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

* Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
* Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### Penyusunan Aset Tetap

* Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
* Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
* Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
* Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
* Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelompok Aset Tetap** | **Masa Manfaat** |
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

#### Piutang Jangka Panjang

* + - Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### Aset Lainnya

* Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
* Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
* Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
* Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelompok Aset Tak Berwujud** | **Masa Manfaat (tahun)** |
| *Software* Komputer | 4 |
| *Franchise* | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

* + Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

* Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
* Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek
2. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
4. Kewajiban Jangka Panjang
5. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

* Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas

* Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pendapatan Negara dan Hibah |
| *Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 0* | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibahyang diterima oleh Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. |
|  | Belanja |
| *Realisasi Belanja Negara : Rp 2.789.824.911* | Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.789.824.911 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 96,77% dari anggaran senilai Rp. 2.882.746.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :  Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **31 Desember TA 2017** | | | | **Pagu** | **Realisasi** | **%** | | Belanja Pegawai | **1.882.443.000** | **1.804.380.942** | **95,85** | | Belanja Barang | **624.303.000** | **609.790.469** | **97,67** | | Belanja Modal | **376.000.000** | **375.653.500** | **99,90** | | Total Belanja Bruto | **2.882.746.000** | **2.789.824.911** | **96,77** | | Pengembalian Belanja |  | **0** | **0** | | Total Belanja Netto | **2.882.746.000** | **2.789.824.911** | **96,77** |   Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :  Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017  *(dalam satuan Rupiah)*  ***Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016***  Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. Rp. 543.176.287 atau sebesar 24.17 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama, hal tersebut karena ada kenaikan Pagu.  Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:  Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik (Turun)** | | | **Rp** | **%** | | Belanja Pegawai | **1.804.380.942** | **1.566.566.404** | **237.814.538** | **15,18** | | Belanja Barang | **609.790.469** | **531.082.220** | **78.708.249** | **14,82** | | Belanja Modal | **375.653.500** | **149.000.000** | **226.653.500** | **152,11** | | Total Belanja | **2.789.824.911** | **2.246.648.624** | **543.176.287** | **24,17** | |
|  | Belanja Pegawai |
| *Realisasi Belanja Pegawai : Rp 1.804.380.942* | Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.804.380.942 dan Rp. 1.566.566.404.  Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 15.18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017.  Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:  Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Gaji Pokok PNS | **435.852.400** | **428.511.900** | **7.340.500** | | **1,71** | | Beban Pembulatan Gaji PNS | **4.888** | **4.612** | **276** | | **5,98** | | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | **21.985.960** | **21.561.440** | **424.520** | | **1,96** | | Beban Tunj. Anak PNS | **8.794.384** | **8.624.576** | **169.808** | | **1,96** | | Beban Tunj. Struktural PNS | **31.850.000** | **30.916.550** | **933.450** | | **3,01** | | Beban Tunj. PPh PNS | **15.350** | **5.818.339** | **(5.802.989)** | | **(99,73)** | | Beban Tunj. Beras PNS | **20.856.960** | **20.856.960** | **0** | | **0,00** | | Beban Uang Makan PNS | **70.561.000** | **68.102.000** | **2.459.000** | | **3,61** | | Beban Tunjangan Umum PNS | **14.300.000** | **14.670.000** | **(370.000)** | | **(2,52)** | | Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI | **17.160.000** | **16.531.150** | **628.850** | | **3,80** | | Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara | **1.183.000.000** | **911.500.000** | **271.500.000** | | **29,78** | | Beban Uang Lembur | **0** | **65.353.000** | **(65.353.000)** | | **(100,00)** | | Total Belanja Brutto | **1.804.380.942** | **1.592.450.527** | **211.930.415** | | **13,30** | | Pengembalian Belanja | **0** | **(25.884.123)** | **25.884.123** | | **(100,00)** | | Total Belanja Netto | **1.804.380.942** | **1.566.566.404** | **237.814.538** | | **15,18** | |
|  | Belanja Barang |
| *Realisasi Belanja Barang : Rp. 609.790.469* | Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 609.790.469 dan Rp. 531.082.220.  Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 14,82 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016.  Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :  Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Perubahan** | | |  | **Realisasi** | **Realisasi** | **Rp** | **%** | | Belanja Barang Operasional | **273.099.875** | **241.219.319** | **31.880.556** | **13,21** | | Belanja Jasa | **90.429.685** | **87.375.962** | **3.053.723** | **3,49** | | Belanja Pemeliharaan | **189.970.771** | **154.747.949** | **35.222.822** | **22,76** | | Belanja Perjalanan Dinas | **19.768.344** | **19.665.000** | **103.344** | **0,52** | | Total Belanja Brutto | **609.790.469** | **531.082.220** | **78.708.249** | **14,82** | | Pengembalian Belanja | **0** | **0** | **0** | **0** | | Total Belanja Netto | **609.790.469** | **531.082.220** | **78.708.249** | **14,82** | |
|  | Belanja Modal |
| *Realisasi Belanja Modal : Rp.375.653.500* | Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 375.653.500 dan Rp. 149.000.000.  Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar 152,11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016.  Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :  Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Perubahan** | | | **Rp** | **%** | | Belanja Modal Tanah | **50.000** | **0** | **50.000** | **0,00** | | Belanja Modal Peralatan & Mesin | **375.603.500** | **149.000.000** | **226.603.500** | **100,00** | | Total Belanja Brutto | **375.653.500** | **149.000.000** | **226.653.500** | **152,11** | | Pengembalian Belanja | **0** | **0** | **0** | **0** | | Total Belanja Netto | **375.653.500** | **149.000.000** | **226.653.500** | **152,11** | |

## Penjelasan atas Pos-pos Neraca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aset Lancar: Rp 0* | Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.815.400 dan Rp. 1.104.650.  Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.  Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:    Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Uraian | TA 2017 | TA 2016 | |  | **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **0** | **0** | |  | **Persediaan** | **5.815.400** | **1.104.650** | |  | **Total Aset Lancar** | **5.815.400** | **1.104.650** | | |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran | |
| *Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 0* | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.  Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :  Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Jenis | 31 Desember TA 2017 | 31 Desember TA 2016 | |  |  |  |  | |  | **Jumlah** | **0** | **0** | | |
|  | Persediaan | |
| *Persediaan: Rp. 5.815.400* | Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.815.400 dan Rp. 1.104.650. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:  Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Uraian | 31 Desember 2017 | 31 Desember 2016 | | 1 | **Barang Konsumsi** | **3.409.400** | **1.104.650** | | 2 | **Amunisi** | **0** | **0** | | 3 | **Bahan Untuk Pemeliharaan** | **2.406.000** | **0** | | 4 | **Suku Cadang** | **0** | **0** | | 5 | **Pita Cukai, Materai dan Leges** | **0** | **0** | | 6 | **Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat** | **0** | **0** | | 7 | **Bahan Baku** | **0** | **0** | | 8 | **Barang dalam Proses** | **0** | **0** | | 9 | **Persediaan untuk Tujuan Strategis** | **0** | **0** | | 10 | **Persediaan Barang Hasil Sitaan** | **0** | **0** | | 11 | **Persediaan lainnya** | **0** | **0** | |  | **Total** | **5.815.400** | **1.104.650** | | |
|  | Aset Tetap | | |
| *Aset Tetap : Rp 12.071.859.195* | Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 12.071.859.195 dan Rp. 8.032.250.336. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.  Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut : | | |
|  | Rincian Aset Tetap  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Perubahan** | | 1 | **Tanah** | **4.683.750.000** | **1.000.000.000** | **3.683.750.000** | | 2 | **Peralatan dan Mesin** | **2.876.749.893** | **2.534.024.493** | **342,725,400** | | 3 | **Gedung dan Bangunan** | **6.793.977.000** | **6.949.027.234** | **(155,050,234)** | | 4 | **Jalan , Irigasi, dan Jaringan** | **68.300.000** | **99.100.000** | **(30,800,000)** | | 5 | **Aset Tetap Lainnya** | **0** | **0** | **-** | | 6 | **Konstruksi dalam Pengerjaan** | **0** | **0** | **-** | |  | **Jumlah** | **14.422.776.893** | **10.582.151.727** | **3,840,625,166** | |  | **Akumulasi Penyusutan** | **(2.350.917.698)** | **(2.549.901.391)** | **198,983,693** | |  | **Nilai Buku Aset Tetap** | **12.071.859.195** | **8.032.250.336** | **4,039,608,859** | | | |
|  | | Tanah | |
| *Tanah: Rp. 4.683.750.000* | | Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.683.750.000 dan Rp. 1.000.000.000.  Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :  Rincian Saldo Tanah   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | KIB | Luas (m2) | No. Sertifikat | Atas Nama | Peruntukan | Jumlah | | 1. | **1** | **2.500** | **122 GSU 1365** | **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI** | **Pembangunan Gedung Kantor Dilmil III-13 Madiun** | **4.683.750.000** | | Jumlah | |  |  |  |  | **4.683.750.000** |   Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan perubahan nama pada Sertifikat Barang Milik negara berupa tanah yang semula atas nama Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Militer III-13 Madiun menjadi Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 144 / BUA / PL / V / 2010 tanggal 06 Mei 2010 tentang Pensertifikatan Aset BMN berupa tanah.  Perubahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai dengan Surat Permohonan Kadilmil III-13 Madiun kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota madiun Nomor W3 Mil 02 / PL.01 / 07 / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Perubahan atas nama Pemilik Hak Sertifikat.  Telah dilaksanakan Revaluasi sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor 017/REKON-IP/WKN.10/KNL.06/2017 tanggal 12 Oktober 2017 serta Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Nomor LHIP-0018/WKNL.10/KPKNL.06/2017 tanggal 12 Oktober 2017. | |
|  | | Peralatan dan Mesin | |
| *Peralatan dan Mesin : Rp 2.876.749.893* | | Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.876.749.893 dan Rp. 2.534.024.493.  Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :   |  |  | | --- | --- | | Saldo per 31 Desember 2016 | 2.534.024.493 | | Mutasi Tambah | **375.603.500** | |  |  | | Mutasi Kurang | **32.878.100** | |  |  | | Saldo per 31 Desember 2017 | **2.876.749.893** | | Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 | **(2.213.965.718)** | | Nilai Buku 31 Desember 2017 | **662.784.175** |   Realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan mesin bertambah senilai Rp. 375.603.500,-  antara lain :   * + 1. Belanja Pengolah Data pendukung kesekretariatan senilai Rp. 36.465.000,-  1. 1 (Satu) Unit P.C. All In One I3 Lenovo sejumlah Rp. 9.982.500,- 2. 1 (satu) Unit Printer Epson L310 Rp. 2.475.000,- 3. 1 (satu) Unit CCTV Rp. 19.030.000,- 4. 1 (Unit) Finger Scan Revo FF 153 BNC Pro Rp. 4.977.500,- 5. Honor Pengadaan Rp. 980.000,-    * 1. Belanja Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Sejumlah Rp. 198.000.000,- 6. 3 (Tiga) Unit AC Panasonic Rp. 17.902.500,- 7. 10 (sepuluh) Unit Meja Kerja 1 biro Rp. 59.950.000,- 8. 10 (sepuluh) Unit Kursi kerja standart Direksi Rp. 34.650.000,- 9. 6 (Enam) Unit Lemari Arsip Rp. 23.925.000,- 10. 1 (Satu) set Meja Kursi Tamu Rp. 19.992.500,- 11. 6 (Enam) Unit Lemari Pakaian Rp. 41.580.000,- 12. Honor Pengadaan Rp. 980.000,-     * 1. Belanja Pengolah Data Pendukung SIPP Sejumlah Rp. 138.198.500,-          + 1. 1 (satu) Unit ATR *(Audio Translate Recorder)* Rp. 26.933.500,-            2. 3 (Tiga) Unit Dekstop All In One Lenovo Idecentere I5 Rp. 44.880.000,-            3. 1 (satu) Unit Laptop Fujitsu E546 Rp. 14.795.000,-            4. 2 (dua) Unit Printer Epson L310 Rp. 4.950.000,-            5. 1 (satu) Unit TV Led Samsung 55 Inci Rp. 19.965.000,-            6. 2 (dua) Unit UPS GXT 1000-MT Rp. 19.360.000,-            7. 1 (satu) Unit Scanner Fujitsu SP 1130 Rp. 7.315.000,-            8. Honor Pengadaan Rp. 980.000,-   Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. | |
|  | | Gedung dan Bangunan | |
| *Gedung dan Bangunan : Rp 6.793.977.000* | | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.793.977.000 dan Rp. 6.949.027.234.  Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:   |  |  | | --- | --- | | Saldo per 31 Desember 2016 | 6.949.027.234 | | Mutasi Tambah | **468.682.214** | |  |  | | Mutasi Kurang | **623.732.448** | |  |  | | Saldo per 31 Desember 2017 | **6.793.977.000** | | Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 | **(75.289.476)** | | Nilai Buku 31 Desember 2017 | **6.718.687.524** |   Telah dilaksanakan Revaluasi sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor 017/REKON-IP/WKN.10/KNL.06/2017 tanggal 12 Oktober 2017 serta Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Nomor LHIP-0018/WKNL.10/KPKNL.06/2017 tanggal 12 Oktober 2017.  Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. | |
|  | | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | |
| *Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 68.300.000* | | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 68.300.000 dan Rp. 99.100.000.  Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :   |  |  | | --- | --- | | Saldo per 31 Desember 2016 | 99.100.000 | | Mutasi Tambah | **0** | |  |  | | Mutasi Kurang | **30.800.000** | |  |  | | Saldo per 31 Desember 2017 | **68.300.000** | | Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 | **(61.662.504)** | | Nilai Buku 31 Desember 2017 | **6.637.496** |   Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. | |
|  | | Aset Tetap Lainnya | |
| *Aset Tetap Lainnya: Rp. 112.631.274* | | Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 112.631.274 dan Rp. 58.385.674.  Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :   |  |  | | --- | --- | | Saldo per 31 Desember 2016 | 58.385.674 | | Mutasi Tambah | **54.245.600** | |  |  | | Mutasi Kurang | **0** | |  |  | | Saldo per 31 Desember 2017 | **112.631.274** | | Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 | **(112.190.274)** | | Nilai Buku 31 Desember 2017 | **441.000** |   Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. | |
|  | | Konstruksi dalam Pengerjaan | |
| *Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0* | | Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. | |
|  | | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | |
| *Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (2.350.917.698)* | | Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing (Rp. 2.350.917.698) dan (Rp. 2.549.901.391).  Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).  Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.  Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Uraian** | **Nilai Perolehan** | **Akumulasi Penyusutan** | **Nilai Buku** | | **1** | **Peralatan dan Mesin** | **2,876,749,893** | **2,213,965,718** | **662,784,175** | | **2** | **Gedung dan Bangunan** | **6,793,977,000** | **75,289,476** | **6,718,687,524** | | **3** | **Jalan , Irigasi, dan Jaringan** | **68,300,000** | **61,662,504** | **6,637,496** | | **4** | **Aset Tetap Lainnya** | **112,631,274** | **112,190,274** | **441,000** | |  | **Jumlah** | **9,851,658,167** | **2,463,107,972** | **7,388,550,195** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aset Lainnya:*  *Rp . 0* | | Aset Lainnya Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.  Rincian Aset Lainnya  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Uraian | TA 2017 | TA 2016 | | 1 | **Aset tak Berwujud** | **0** | **0** | | 2 | **Aset Lain-lain** | **0** | **0** | |  | **Nilai perolehan Aset Lainnya** | **0** | **0** | |  | **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya** | **0** | **0** | |  | **Nilai buku Aset Lainnya** | **0** | **0** | |
|  | | Aset Lain-lain |
| *Aset Lain-lain :*  *Rp . 112.631.274* | | Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 112.631.274 dan Rp. 58.385.674. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun serta dalam proses penghapusan dari BMN.  Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :   |  |  | | --- | --- | | Saldo per 31 Desember 2016 | 58.385.674 | | Mutasi Tambah | **54.245.600** | | Mutasi Kurang |  | | Saldo per 31 Desember 2017 | **112.631.274** | |
|  | Kewajiban Jangka Pendek | |
| *Kewajiban Jangka Pendek :*  *Rp. 6.374.152* | Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.374.152 dan Rp. 7.557.973. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 7.557.973  Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah :  Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | | Utang Kepada Pihak Ketiga | **6.374.152** | **7.557.973** | | Jumlah | **6.374.152** | **7.557.973** | | |
|  | Utang kepada Pihak Ketiga | |
| *Utang kepada Pihak Ketiga:*  *Rp. 6.374.152* | Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.374.152 dan Rp. 7.557.973. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).  Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Militer III - 13 Madiun per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  Rincian Utang kepada Pihak Ketiga   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan | | 1. | **Beban Langganan Listrik** | **6.193.085** | **Belanja yang masih harus di bayar** | | 2. | **Beban langganan Telepon** | **149.067** | **Belanja yang masih harus di bayar** | | 3. | **Beban langganan Air** | **32.000** | **Belanja yang masih harus di bayar** | |  | **Jumlah** | **6.374.152** |  | | |
|  | Uang Muka dari KPPN | |
| *Uang Muka dari KPPN:*  *Rp 0* | Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. | |
|  | Ekuitas | | |
| *Cadangan Piutang:*  *Rp 12.071.741.443* | Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.071.741.443 dan Rp. 8.025.797.013. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.  Per tanggal 31 Desember 2017 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 4.045.944.430 (50.41%) dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 6.374.152, sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 7.557.973 | | |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | | | |
| Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak | | | |
| Beban Pegawai | | | |
| *Beban Pegawai : Rp 1.804.380.942* | Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.804.380.942 dan Rp. 1.566.566.404. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.  Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:  Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Uraian | TA 2017 | TA 2016 | Naik(Turun) | % | | | Beban Gaji Pokok PNS | **435.852.400** | **428.511.900** | **7.340.500** | | **1,71** | | Beban Pembulatan Gaji PNS | **4.888** | **4.612** | **276** | | **5,98** | | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | **21.985.960** | **21.561.440** | **424.520** | | **1,96** | | Beban Tunj. Anak PNS | **8.794.384** | **8.624.576** | **169.808** | | **1,96** | | Beban Tunj. Struktural PNS | **31.850.000** | **30.916.550** | **933.450** | | **3,01** | | Beban Tunj. PPh PNS | **15.350** | **5.818.339** | **(5.802.989)** | | **(99,73)** | | Beban Tunj. Beras PNS | **20.856.960** | **20.856.960** | **0** | | **0,00** | | Beban Uang Makan PNS | **70.561.000** | **68.102.000** | **2.459.000** | | **3,61** | | Beban Tunjangan Umum PNS | **14.300.000** | **14.670.000** | **(370.000)** | | **(2,52)** | | Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI | **17.160.000** | **16.531.150** | **628.850** | | **3,80** | | Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara | **1.183.000.000** | **911.500.000** | **271.500.000** | | **29,78** | | Beban Uang Lembur | **0** | **65.353.000** | **(65.353.000)** | | **(100,00)** | | Total Beban Pegawai | **1.804.380.942** | **1.592.450.527** | **211.930.415** | | **13,30** | | | |
| Beban Persediaan | | | |
| *Beban Persediaan : Rp. 18.424.394* | Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.424.394 dan Rp. 23.386.300 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Uraian | TA 2017 | TA 2016 | Naik(Turun) | % | | | Beban Persediaan Konsumsi | **18.424.394** | **23.344.300** | **(4.919.906)** | | **(21.217)** | | Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | **0** | **0** |  | |  | | Beban Persediaan Suku Cadang | **0** | **0** |  | |  | | Beban Persediaan Lainnya | **0** | **0** |  | |  | | Total Beban Persediaan | **18.424.394** | **23.344.300** | **(4.919.906)** | | **(21.217)** | | | |
| Beban Barang dan Jasa | | | |
| *Beban Jasa : Rp. 362.345.739* | Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 362.345.739 dan Rp. 329.259.660 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Langganan Daya dan Jasa | **90.429.685** | **87.375.962** | **3.053.723** | | **3.37** | | Beban Jasa Pos dan Giro | **17.928.775** | **19.979.655** | **(2.050.880)** | | **(11.43)** | | Beban Jasa Konsultan | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Jasa Profesi | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Jasa Lainnya | **253.987.279** | **221.904.043** | **32.083.236** | | **12.63** | | Total Beban Jasa | **362.345.739** | **329.259.660** | **33.086.079** | | **9.13** | | | |
| Beban Pemeliharaan | | | |
| *Beban Pemeliharaan: Rp. 203.656.621* | Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 203.656.621 dan Rp. 161.949.249 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Uraian | TA 2017 | TA 2016 | Naik(Turun) | % | | | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | **101.422.000** | **59.702.281** | **41.719.719** | | **41.13** | | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | **83.196.271** | **88.952.968** | **(5.756.697)** | | **(6.91)** | | Beban Pemeliharaan lainnya | **19.038.350** | **13.336.000** | **5.702.350** | | **2.99** | | Total Beban Pemeliharaan | **203.656.621** | **161.949.249** | **41.707.372** | | **20.47** | | | |
| Beban Perjalanan Dinas | | | |
| *Beban Perjalanan Dinas : Rp . 19.768.344* | Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.768.344 dan Rp. 19.665.000 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Perjalanan Biasa | **19.048.344** | **19.035.000** | **13.344** | | **0.07** | | Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | **720.000** | **630.000** | **90.000** | | **12.5** | | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Total Beban Perjalanan Dinas | **19.768.344** | **19.665.000** | **103.344** | | **0.52** | | | |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | |
| *Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0* | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | |
| Beban Bantuan Sosial | | | |
| *Beban Bantuan Sosial : Rp . 0* | Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Bantuan Sosial  per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Total Beban Bantuan Sosial | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | |
| *Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 480.824.835* | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 480.824.835 dan Rp.416.935.728Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Jumlah Penyusutan | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Amortisasi Aset tak Berwujud | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Penyusutan Aset lain-lain | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Jumlah Amortisasi | **480.824.835** | **416.935.728** | **63.889.107** | | **15.323** | | Total Beban Penyusutan dan Amortisasi | **480.824.835** | **416.935.728** | **63.889.107** | | **15.323** | | | |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | | | |
| *Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp . 0* | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Piutang tak Tertagih  per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | |
| Beban Lain-lain | | | |
| *Beban Lain-Lain : Rp. 0* | Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Beban Lain-lain  per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Total Beban Lain-lain | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | |
| Kegiatan Non Operasional | | | |
| *Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 299.200* | Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Kegiatan Non Operasional  per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Penjualan Alat Angkut Darat | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Penjualan Alat Kantor |  |  |  | |  | | Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | **613.830** | **856.310** | **(242.480)** | | **(28.317)** | | Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | **314.630** | **126.500** | **188.130** | | **148.719** | | Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | **299.200** | **729.810** | **(430.610)** | | **(59.003)** | | | |
| Pos Luar Biasa | | | |
| *Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0* | Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Pos Luar Biasa  per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Uraian** | **TA 2017** | **TA 2016** | **Naik(Turun)** | **%** | | | Pendapatan PNBP | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Perjalanan Dinas | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Beban Persediaan | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Total Pos Luar Biasa | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekuitas Awal | | |
|  | Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.025.797.013 dan Rp. 8.296.180.836 | |
| Surplus (defisit) LO | | |
|  | Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp. 2.889.101.675) dan (Rp. 2.517.032.531) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. | |
| 1. Penyesuaian Nilai Aset | | |
|  | Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir | |
| 2 Koreksi Nilai Persediaan | | |
|  | Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:  Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  per 31 Desember TA 2017  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  | | --- | --- | | Uraian | Koreksi | | Barang Konsumsi | **0** | | Suku Cadang | **0** | | Barang Persediaan Lainnya | **0** | | Total Koreksi Nilai Persediaan | **0** | | |
| 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap | | |
| ***.*** | Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.144.682.214 dan Rp. 0 Revaluasi Aset tersebut berasal Penilaian kembali atas tanah dan Gedung Bangunan | |
| 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi | | |
| ***.*** | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 538.980 dan Rp. 84 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. | |
| 5 Koreksi Lain-lain | | |
|  | Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :  Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  per 31 Desember TA 2017  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  | | --- | --- | | **Uraian** | **Koreksi** | | Koreksi beban | **0** | | Koreksi Pendapatan | **0** | | Koreksi Piutang | **0** | | Koreksi Kewajiban | **0** | | Koreksi hibah | **0** | | Jumlah | **0** | | |
| Transaksi Antar Entitas | | |
|  | Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.789.824.911 dan Rp. 2.246.648.624  Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.  Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  per 31 Desember TA 2017  *(dalam satuan Rupiah)*   |  |  | | --- | --- | | **Transaksi antar Entitas** | **Nilai** | | Diterima dari Entitas Lain | **0** | | Ditagihkan ke Entitas Lain | **2.789.824.911** | | Transfer Masuk | **0** | | Transfer Keluar | **0** | | Pengesahan Hibah Langsung | **0** | | Pengesahan Pengembalian hibah Langsung | **0** | | Jumlah | **2.789.824.911** | | |
| 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) | | |
|  | Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017 , DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 2.789.824.911 | |
| 2Transfer Masuk/Transfer Keluar | | |
|  | Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2017.  Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, adalah Rp. 0.  Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Pemberi Hibah** | **Bentuk Hibah** | **Nilai Hibah** | | 1 | **WHO** | **Uang** | **0** | | 2 | **ABC** | **Barang** | **0** |   Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran | |
| Ekuitas Akhir | |
| Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.071.741.443 dan Rp. 8.025.797.013 | |

## Pengungkapan Penting Lainnya

### Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### Pengungkapan Lain-lain

#### Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

#### Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja Barang berupa Langganan Listrik tagihan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 6.193.085,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2018.
2. Terdapat belanja Barang berupa Langganan Telpon tagihan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 149.067,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2018.
3. Terdapat belanja Barang berupa Langganan Air tagihan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 32.000,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2018.

#### Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

1. BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0. –
2. BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0. -

#### Revisi DIPA

1. Revisi DIPA kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/24/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran (Revisi Halaman III DIPA).

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

1. Kategori Revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
2. Jenis Revisi adalah pergeseran anggaran dalam komponen (052) Pengadaan Sertifikat Tanah ke dalam Komponen (060) Pengadaan Alat pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP sebesar Rp. 19.800.000,-
3. Perubahan Halaman III DIPA.
4. Revisi DIPA kedua sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/38/IV/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran (Revisi Halaman I dan III DIPA).

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 MAdiun telah melaksanakan Tugas Pendidikan di Surabaya selama 2 (dua) bulan sehingga sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Tugas dan Wewenang KPA di delegasikan ke Kasubbag Umum dan Keuangan.
2. Bahwa setelah dilakukan Estimasi belanja Pegawai terdapat kekurangan Pagu pada Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara sebesar Rp. 170.300.000, sedangkan Akun Belanja Pegawai lain terdapat kelebihan pagu, sehingga diambil untuk memenuhi kekurangan pada Akun Belanja TPPN.
3. Kategori Revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
4. Perubahan halaman I dan III DIPA
5. Revisi DIPA ketiga sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/47/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

1. Melaksanakan perintah Kabua MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) berupa Pengadaan Antivirus yang sebelumnya menggunakan Akun belanja Modal 536111 menjadi 521119 karena Pengadaan AntiVirus tersebut masa aktifnya 1 (Satu) tahun.
2. Tujuan Revisi Anggaran adalah untuk meningkatkan Efektifitas, kualitas belanja dan Optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
3. Revisi DIPA keempat sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/56/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

1. Revisi POK Belanja Pegawai yang masih dalam satu output, satu komponen antar akun yang berbeda menyebabkan penambahan pagu antara pada Akun 511339 semula Rp. 1.012.700.000,- menjadi Rp. 1.183.000.000,-.
2. Melaksanakan Perintah Sekretaris MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) yang semula jadi satu pada Sub Komponen Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP di Revisi menjadi Sub Komponen (b) yaitu Pengadaan alat komunikasi dan Pengolah Data untuk Sarana Eskum berupa ATR.
3. Melaksanakan Perintah Kabua MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) berupa Pengadaan Antivirus yang sebelumnya menggunakan Akun Belanja Modal 536111 menjadi 521119 karena pengadaan anti virus tersebut masa aktifnya 1 (Satu) tahun.
4. Tujuan Revisi Anggaran adalah untuk meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan Optimalisasi penggunaan Anggaran yang terbatas.
5. Ralat halaman III DIPA.

#### Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB:

Tidak terdapat ralat SPM selama Semester II TA 2016.

Tidak terdapat ralat SSBP selama Semester II TA 2016.

Terdapat SSPB hal tersebut mengenai Pengambalian Sisa UP sebesar Rp. 5.411.250,-

#### Catatan Penting Lainnya

1. Sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / SK / 01 / I / 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, serta Staf Pengelola Anggaran di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / SK / 08 / I / 2016 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran. maka terbentuk Tim Keuangan atas nama :

Kuasa Pengguna Anggaran : Awan Karunia Sanjaya, SH., MH. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P  
Pejabat Pembuat Komitmen : Mulyono Sertu NRP. 31970176050877  
Pejabat Penanda tangan SPM / Penguji SPM : Sardi, III/c NIP. 196404241989031003  
Bendahara Pengeluaran : Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806

1. Pada tanggal 10 Juli 2017 terdapat perubahan KPA Dilmil III-13 Madiun semula dijabat oleh Kapten Laut (KH) Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. menjadi PNS Gatot Suprapto Sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/Sprin-42/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Perintah melaksanakan Tugas, Wewenang dan tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selama KPA an Kapten Laut (KH) Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. melaksanakan pendidikan Aplikasi II TNI AL TA 2017.
2. Pada tanggal 21 Agustus 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun PPSMP atas nama PNS Sardi melaksnakan Diklatpim IV sehingga Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan PPSPM atas nama Gatot Suprapto sebagai PPSPM sesuai dengan SK Nomor W3 MIL 02/SK/26/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
3. Pada tanggal 11 September 2017 Kadilmil mengeluarkan Surat Perintah Nomor W3 MIL 02/Sprin-65/IX/2017 tentang pergantian pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun semula dijabat oleh PNS Gatot Suprapto menjadi Kapten Laut (KH) Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

*DAFTAR DAN LAMPIRAN*

# Daftar dan Lampiran

## Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

1. *RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Militer III - 13 Madiun**

**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**

**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

Tabel 1 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Aset Tetap | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|  |  |  |  | Per 31 Desember 2016 | 2017 | Per 31 Desember 2017 | Per 31 Desember 2017 |
| A. | **Peralatan dan Mesin** |  | **2.880.632.393** | **1.923.951.735** | **323.039.083** | **(30.548.600)** | **664.190.175** |
|  | **Alat Angkutan Darat Bermotor** | **7** | **409.670.503** | **372.663.358** | **24.671.430** | **0** | **12.335.715** |
|  | **Alat Bengkel Bermesin** | **10** | **1.210.000** | **423.500** | **121.000** | **0** | **665.500** |
|  | **Alat Ukur** | **5** | **42.353.350** | **27.074.350** | **3.454.000** | **0** | **11.825.000** |
|  | **Alat Kantor** | **5** | **334.544.990** | **204.510.718** | **33.693.068** | **0** | **96.341.204** |
|  | **Alat Rumah Tangga** | **5** | **974.730.300** | **578.005.790** | **138.875.054** | **0** | **257.849.456** |
|  | **Alat Studio** | **5** | **44.034.000** | **22.080.500** | **8.453.000** | **(15.588.600)** | **29.089.100** |
|  | **Alat Komunikasi** | **5** | **21.687.000** | **12.446.650** | **3.837.400** | **0** | **5.402.950** |
|  | **Peralatan Pemancar** | **10** | **191.800.000** | **67.130.000** | **19.180.000** | **0** | **105.490.000** |
|  | **Komputer Unit** | **4** | **669.957.500** | **507.930.000** | **6.282.500** | **(14.960.000)** | **116.705.000** |
|  | **Peralatan Komputer** | **4** | **190.644.750** | **131.686.869** | **30.471.631** | **0** | **28.486.250** |
| B. | **Gedung dan Bangunan** |  | **6.793.977.000** | **554.242.176** | **144.163.748** | **(623.116.448)** | **6.718.687.524** |
|  | **Bangunan Gedung Tempat Kerja** | **50** | **6.793.977.000** | **554.242.176** | **144.163.748** | **(623.116.448)** | **6.718.687.524** |
| C. | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** |  | **68.300.000** | **73.797.480** | **13.852.504** | **(25.987.480)** | **6.637.490** |
|  | **Instalasi Lain** | **5** | **68.300.000** | **70.910.000** | **13.660.000** | **(23.100.000)** | **6.830.000** |
|  | **Jaringan Telepon** | **20** | **0** | **2.887.480** | **192.504** | **(2.887.480)** | **(192.504)** |
| D. | **Aset Tetap Lainnya** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Bahan Perpustakaan Tercetak** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E. | **Aset Tetap yang Tidak Digunakan** |  | **112.881.274** | **58.635.674** | **156.000** | **53.648.600** | **441.000** |
|  | **Alat Kantor** | **5** | **6.083.150** | **6.083.150** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Alat Rumah Tangga** | **5** | **1.047.874** | **1.047.874** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Alat Studio** | **5** | **22.812.000** | **6.626.400** | **156.000** | **15.588.600** | **441.000** |
|  | **Komputer Unit** | **4** | **54.594.000** | **39.634.000** | **0** | **14.960.000** | **0** |
|  | **Peralatan Komputer** | **4** | **5.244.250** | **5.244.250** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Instalasi Lain** | **1** | **23.100.000** | **0** | **0** | **23.100.000** | **0** |
|  | **Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya** | | **9.855.790667** | **2.610.627.065** | **481.211.335** | **(626.003.928)** | **7.389.956.195** |